

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2017-2021**

Seprita Siska Manurung¹, Sabeth Sembiring², Poltak Parhusip³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
manurungseprita@gmail.com¹, sabethsembiring@gmail.com², ikoparhusip17@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditures in the Regencies/Cities Government of South Sumatra Province for a period 2017-2021. The sample of this study is the entire population consisting of 17 districts/cities with a 5 year study period. The research method used is quantitative using secondary data sourced from the APBD Realization Report obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance of the Republic of Indonesia. The analysis technique used is descriptive statistical analysis then classical assumption testing and finally hypothesis testing. Partially it shows that Regional Original Income has a positive and significant effect on Capital Expenditure. The General Allocation Funds have no effect on Capital Expenditure. Simultaneous it shows that Local Own Revenue and General Allocation Fund have a positive and significant effect on Capital Expenditure.

Keywords: *Regional Original, General Allocation Funds, Capital Expenditures.*

PENDAHULUAN

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 1999. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 01 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis.

Fahmi & Hairani (2019: 40-50) Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam APBD terdapat sisi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan sendiri dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang di berikan oleh pusat ke daerah yang disebut Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Pendapatan Lain- lain yang sah.

Menurut Sihombing (2011: 25) Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana dimaksud pada UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Rendahnya belanja modal merupakan suatu permasalahan karena belanja modal merupakan unsur penting dalam pelayanan publik, administrasi pemerintahan, terlebihnya terhadap suatu perekonomian.

Menurut Halim (dalam Aryani, 2017: 3) Tujuan PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dengan bertambahnya pendapatan asli daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat bertambahnya investor akan meningkatkan belanja modal. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Anggreani (2022: 2) Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai sumber Pendapatan Daerah. Penerimaan daerah awal dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang digunakan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan belanja pembangunan untuk meminimalkan ketergantungan daerah terhadap subsidi pemerintah pusat. Kebutuhan akan peningkatan belanja pemerintah bagian atau Kabupaten/Kota tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah. Pada akhirnya, dana transfer seperti Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk menutupi kebutuhan Belanja Daerah.

Pemerintah daerah diharuskan untuk berupaya meningkatkan PAD secara terus-menerus dan berkelanjutan agar PAD terus meningkat dan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya peningkatan PAD, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan anggaran untuk belanja modal sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Kebutuhan akan peningkatan belanja pemerintah Kabupaten/Kota Prov. Sumatera Selatan tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah. Pada akhirnya, dana transfer seperti Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk menutupi kebutuhan Belanja Daerah. Semakin besar penerimaan DAU yang merupakan sumber pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Namun, dengan semakin besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi.

Hasil penelitian Maria & Akhmad (2017) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal", objek penelitian ini pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan periode penelitian dari tahun 2013 sampai 2015. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sihombing (2011: 25) Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah;
2. Pendapatan Retribusi Daerah;
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Lain-lain PAD yang sah;
4. Pendapatan dari Pengembalian.

Pratiwi (2007: 22) Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dituliskan bahwa $PAD = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan dari Dana Perusahaan Daerah} + \text{lain - lain pendapatan daerah yang sah}$.

Dana Alokasi Umum

Mengacu Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan bahwa Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Halim (2002: 65) Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN;

2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/ Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas;
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
4. Porsi Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia.

Formula Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar, yaitu gaji PNS Daerah

CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal)

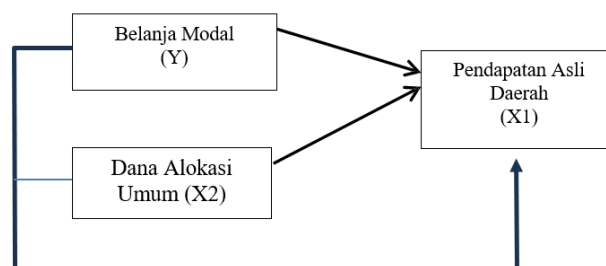
Belanja Modal

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak terwujud. Darise (2008: 141) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Halim (2002: 74) Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Belanja modal di bagi menjadi:

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang bermanfaat dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum;
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.

Dari jenis-jenis belanja modal dapat dituliskan bahwa Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.



Gambar 1. Model Kerangka Berpikir

Hipotesis

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Data diambil melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan data laporan realisasi APBD se-Sumatera Selatan yang berjumlah 17 Kabupaten/ Kota, dengan periode penelitian 5 tahun yakni dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Data diunduh dari situs yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2009: 117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 Kabupaten/Kota dengan periode penelitian 5 tahun.

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang dipandang mewakili populasi. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah populasi tersebut, jadi populasi ini merupakan sampel penelitian. Dari Laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Jumlah sampel yakni 85 (17 Kabupaten/Kota x 5 Tahun).

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasionalisasi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none">• Pajak Daerah• #NAME?• Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan• Lain-lain PAD yang sah	Rasio
Dana Alokasi Umum (X2)	Dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Celah Fiskal + Alokasi Dasar	Rasio

Variabel	Definisi Operasionalisasi	Indikator	Skala
Belanja Modal (Y)	Pengeluaran yang dilakukan dalam rangkapembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan inventari yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Gedung dan Bangunan - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Aset 	Rasio

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Situs Direktorat Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet (www.djpk.kemenkeu.go.id). Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25.0. Ghazali (2006: 145) Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut.

Analisis Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2006: 147) Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Setidaknya ada empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Ghozali (2006: 149) Uji Normalitas adalah uji untuk melihat apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki populasi data yang berdistribusi normal. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul ditengah. Demikian juga nilai rata – rata, modus dan median relatif dekat.

- b. Uji Multikolinearitas
Ghozali (2006: 95) Uji Multikolinearitas adalah uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel–variabel bebas dalam suatu metode regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel–variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.
- c. Uji Heteroskedastisitas
Ghozali (2006: 125) Uji Heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu kepengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana tidak terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya atau disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yakni ZPRED.
- d. Uji Autokorelasi
Ghozali (2006: 99) Uji Autokorelasi adalah uji untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Secara sederhana bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara memenuhi persyaratan yang dimana tidak terdapat autokorelasi. Uji Autokorelasi dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan Uji Durbin Watson.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linear berganda (*multiple regretion*), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan hipotesis penelitian ini. Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal. Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dengan Rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + e$$

Dimana : Y : Belanja Modal

α : Konstantan

β : Slope atau koefisien regresi atau intersept

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU: Dana Alokasi Umum e : error

Uji Hipotesis

- a. Koefisien Determinan (R^2)
Ghozali (2006: 87) Koefisien determinan (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.
- b. Uji Secara Parsial (Uji t)
Ghozali (2006: 88) Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots) terhadap variabel dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:
 - 1. Apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan Signifikan $\leq 5\%$ maka:
 - a. H_a diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan.
 - b. H_0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

2. Apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan Signifikan $> 5\%$ maka:
 - a. H_a ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
 - b. H_0 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan.
 - c. Uji Secara Simultan (Uji F)

Ghozali (2006: 88) Uji F pada dasarnya menunjukkan apa semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan signifikansi sebesar 0,05.

Jika F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum serta nilai rata-rata standard deviasi dari masing-masing variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi PAD, DAU, dan Variabel dependen yaitu Belanja Modal, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	85	27846959237	115887119166	179838331178.6	234590543206.33
Dana Alokasi	85	29107000000	134778596000	616304762964.7	255839757818.95
Belanja Modal	85	92576062279	111591002929	418642371772.3	229802365286.36
Valid N (listwise)	85				

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yaitu berbasis *Ordinary Least Square* (OLS) setidaknya ada empat uji klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal, dan plotting data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smimov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

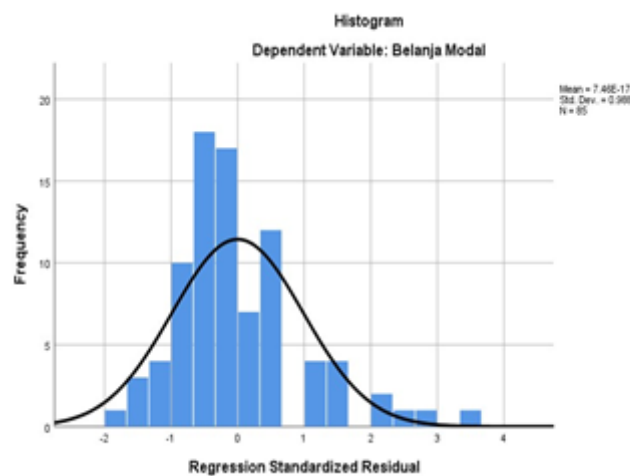
Unstandardized
Residual

N	85
Normal Parameters, a, b	Mean .0000000

	Std. Deviation	111189.28860274
Most Extreme	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.050
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.996 ^a

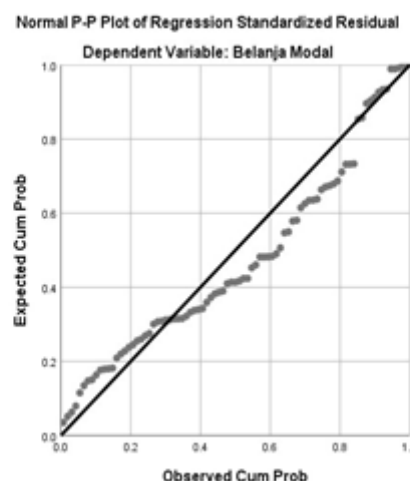
- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dari pengelolaan SPSS hasil didapat berdasarkan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, adalah 0,200 lebih besar dari 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Histogram

Pada Gambar 2 terlihat bahwa variabel terikat yaitu Belanja Modal mempunyai distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas P-Plot

Dari gambar 3 normal P-Plot dapat dilihat bahwa data tersebar mendekati garis diagonal. Hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas bertujuan menguji apakah pada model regresi ada ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas berarti model regresi tersebut baik. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolonieritas dalam model regresi.

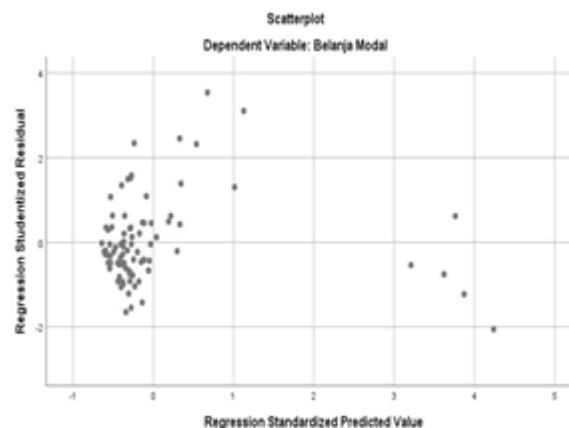
Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Model (Constant)	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pendapatan Asli Daerah	.528	1.893
Dana Alokasi Umum	.528	1.893

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa variabel-variabel di atas memiliki nilai tolerance lebih dari 10% atau 0,1 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pada pola tertentu. Data tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

d. Uji Autokorelasi

Langkah pendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan membandingkan nilai DW *statistic table* (du) dengan nilai DW data (d) dengan wilayah $du < d < 4-du$.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------

1	.758 ^a	.575	.565	115555348491	1.723
---	-------------------	------	------	--------------	-------

Nilai DW *statistic table* dari jumlah data (n)=85 dan jumlah variable Independen dua (k=2) menunjukkan nilai 1,5995. Dan nilai yang diperoleh dari 4-du adalah 2,3043. Nilai DW yang diperoleh adalah 1,723, yang berarti $1,5995 < 1,723 < 2,3043$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Besarnya pengaruh variabel dependen bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi linier berganda.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	354506790591,858	52210128903,720		6.790	.000		
	Pendapatan Asli Daerah	.768	.106	.784	7.222	.000	.528	1.893
	Dana Alokasi Umum	-.120	.098	-.134	-1.231	.222	.528	1.893

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil estimasi jmodel regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut: $Y =$

$$354506790591,858 + 0,768X_1 + (-0,120)X_2 + e$$

Dari hasil persamaan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 354.506.790.591,858. Hasil ini dapat diartikan bahwa jika besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 354.506.790.591,858.
2. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X₁) sebesar 0,768. Hasil ini dapat diartikan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar satuan- satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 0,768 satuan.
3. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (X₂) meningkat satu-satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan mengakibatkan menurunnya nilai variabel Belanja Modal sebesar 0,120 satuan.

Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square*.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.575	.565	115555348491.79158

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel 7, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,565 artinya 56,5% variasi dari semua variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) dapat menerangkan variabel terikat (Belanja Modal), sedangkan sisanya sebesar 0,435 (43,5%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

b. Uji Secara Parsial (Uji t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Untuk pengujian secara parsial digunakan uji t. Kriteria :

Ho diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ untuk $\alpha = 0,05$ (5%) Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk $\alpha = 0,05$ (5%)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	354506790591.858	52210128903.720		6.790	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.768	.106	.784	7.222	.000
	Dana Alokasi	-.120	.098	-.134	-1.231	.222

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) pada tabel 8 di atas dapat dijelaskan:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal, bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,222 > 1,663$) atau nilai signifikan probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ artinya Ha 1 diterima, bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal, bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,231 < 1,663$), atau nilai probabilitas lebih besar 0,05 atau $0,222 > 0,05$ artinya Ha 2 ditolak, bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

c. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apa semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan signifikansi sebesar 0,05.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	216908250245 597270000000 0,000	2	108454125122 798640000000 0,000	39.231	.000 ^b
	Residual	226688417320 562600000000 0,000	82	276449289415 320270000000. 0		
	Total	443596667566 159900000000 0,000	84			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Tabel 9 menunjukkan hasil perhitungan statistic uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ dan F-hitung sebesar 39,231 dan F tabel sebesar 3,957 dimana $39,231 > 3,957$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,222 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ dan nilai t- hitung $7,222 > 1,663$. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar -1,231 dengan arah negatif dan nilai signifikansi sebesar 0,222 dimana $0,222 > 0,05$ dan nilai t- hitung $-1,231 < 1,663$. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.
3. Berdasarkan uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ dan nilai F-hitung $39,231 > 3,108$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreani, Ririn. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Parepare. *Skripsi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri.
- Aryani, Retno Putri. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.

- Fahmi, Muhammad., & Hairani. 2019. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. Vol. 16 No. 1 Tahun 2019: 40-50.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salamba Empat.
- Purba, I. R. ., & Gulo, V. T. I. . (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Periode 2016 - 2021
- Jemparut, Maria S., & Riduwan, Akhmad. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6 Tahun 2017, hal. 1-18.
<http://scholar.google.com>.
- Malau, E. I. ., & Sumaizar, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Pematang Siantar.
- Padang, N. N. ., & Padang, W. S. . (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta
- Pratiwi. 2007. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Saragih, J. L. ., & Lumban Gaol, R. . (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021
- Sihombing, Yonge L.V. 2011. *Manajemen APBD*. Medan: Bina Media Perintis.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*, Jakarta
- Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta
- Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan*. Jakarta
- Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta